

EVALUASI PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI PUPUK DI KABUPATEN SAMBAS - KALIMANTAN BARAT

Budiharjo

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia
e-mail/korespondensi: budiharjo@dsn.moestopo.ac.id

Abstract

This research aims to find out and analyze, the supporters and obstacles, as well as to know and analyze the Government's efforts in evaluating the 2020 NPK-type fertilizer subsidy distribution program in increasing the productivity of farmers in Sambas Regency, West Kalimantan Province. Most of the Indonesia's population work in the agricultural sector. In the agricultural sector, a very important thing is the use of fertilizers. Fertilizer is a commodity that has a strategic role in supporting the agricultural sector and to increase farmer production. This study uses the theory of William Dunn, (2012) as a parameter to evaluate the policy of the 2020 NPK-type fertilizer subsidy distribution program in increasing farmer productivity in Sambas Regency, West Kalimantan Province with four indicators, namely: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, and Responsiveness with the Gap Model (Discrepancy Model). The results showed that the evaluation of the 2020 fertilizer subsidy distribution program in increasing farmer productivity in Sambas Regency, West Kalimantan Province had positive and negative impacts. Even though every aspect has been fulfilled, the district government still has homework to improve this program in the future. The support and cooperation of all parties, and the positive response from the community are indeed two crucial things in a government program. High community support can also maximize a program from the government. The inhibiting factors for the implementation of this program are subsidized fertilizer quotas that are not in proportion to demand, fertilizer arrival schedules are sometimes late, and data collection tends to be late.

Keywords: agriculture, evaluation, subsidy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, pendukung dan penghambat, maupun mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah dalam evaluasi program penyaluran subsidi pupuk jenis NPK tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Penduduk Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, hal yang sangat penting adalah penggunaan pupuk. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani. Penelitian ini menggunakan teori William Dunn, (2012) sebagai parameter untuk mengevaluasi kebijakan program penyaluran subsidi pupuk jenis NPK tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan empat indikator yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Responsivitas dengan Model Kesenjangan (*Discrepancy Model*). Hasil penelitian menunjukkan Evaluasi program penyaluran subsidi pupuk tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat memiliki dampak positif dan negatif. Walaupun setiap aspek telah terpenuhi, tapi pemerintah kabupaten masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki program ini ke depannya. Dukungan dan kerja sama seluruh pihak, dan respon positif dari masyarakat memang menjadi dua hal yang krusial dalam sebuah program pemerintah. Dukungan masyarakat yang tinggi juga bisa memaksimalkan sebuah program dari pemerintah. Faktor penghambat pelaksanaan program ini

berupa kuota pupuk subsidi yang tidak sebanding dengan permintaan, jadwal kedatangan pupuk yang terkadang terlambat, dan pendataan masih cenderung terlambat.

Kata Kunci: evaluasi, pertanian, subsidi

PENDAHULUAN

Pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia. Xenophon, filsuf dan sejarawan Yunani yang hidup 425-355 SM, mengatakan bahwa *"Agriculture is the mother and nourishes of all other arts. When it is well conducted, all other arts prosper. When it is neglected, all other arts decline"*. Pertanian adalah ibu dari segala budaya. Jika pertanian berjalan dengan baik, maka budaya-budaya lainnya akan tumbuh dengan baik pula. Tetapi, manakala sektor ini diterlantarkan, maka semua budaya lainnya akan rusak (Saptana et al., 2018:3). (Saptana et al., 2018). Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai bahan pokok, sehingga kebutuhan akan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tinggi. Dengan demikian keberadaan petani menjadi penting untuk dapat menyediakan pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia (Amalina et al., 2019).

Penduduk Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, hal yang sangat penting adalah penggunaan pupuk. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam

mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani (Syah et al., 2017:4). Jika ketersediaan pupuk sedikit atau harga pupuk mahal, maka akan berpengaruh pada kualitas maupun kuantitas hasil pertanian. Namun, realitas yang seringkali ditemui oleh petani adalah terjadinya kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang tinggi. Untuk itu, ketersediaan pupuk yang berkualitas dan terjangkau menjadi jaminan pemerintah. Salah satu instrumen kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah memberikan subsidi harga pada pupuk. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an (Yuliati, 2018). Meski telah berkali-kali diperbarui, kebijakan pupuk bersubsidi belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang berkualitas dan terjangkau bagi petani. Hal tersebut terjadi karena banyaknya masalah terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

Kebijakan subsidi pupuk mengalami pro dan kontra dari tahun ke tahun. Di satu sisi, pemerintah masih bertahan dengan kebijakan subsidi pupuk untuk mempertahankan ketahanan pangan dengan menjaga tingkat produksi. Produksi dapat dijaga untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan memberikan input yang baik, salah satunya pupuk. Pemanfaatan pupuk yang memadai baik dalam jumlah,

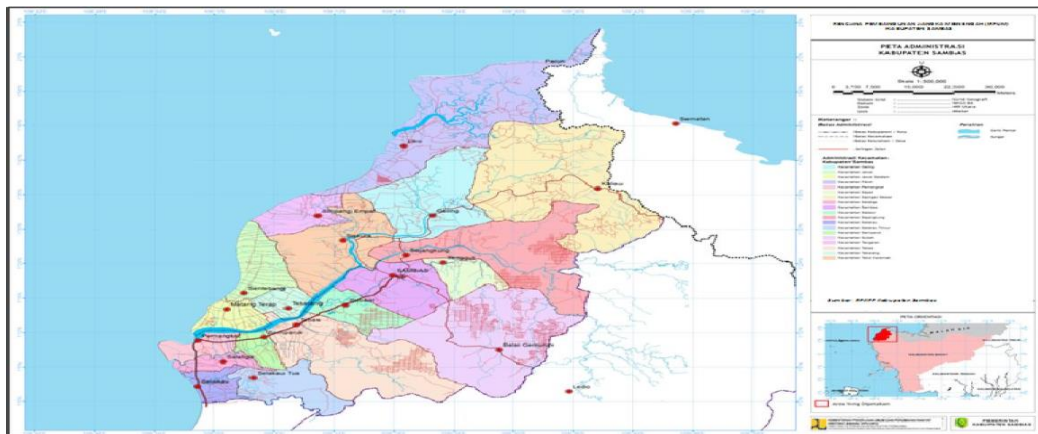
kualitas dan kontinuitasnya diperlukan untuk mengurangi kemunduran kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan Hartatik et al., (2018:2) sehingga jika subsidi pupuk dikurangi dikhawatirkan akan mengganggu produktivitasnya. Namun di sisi yang lain, alokasi anggaran untuk kebijakan subsidi pupuk sangat besar. Pemerintah mulai memangkas anggaran subsidi pupuk dan mengalihkannya ke program-program lain terutama terkait investasi di teknologi pertanian. Pengembangan teknologi di sektor pertanian memiliki manfaat lebih besar dan mampu meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang ketimbang subsidi pupuk yang begitu-begitu saja tanpa ada perkembangan setiap tahun (Asian Bank, 2020). Subsidi pupuk dinilai masih dibutuhkan karena pupuk mempunyai peranan yang penting bagi peningkatan produksi pertanian. Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani dan petani petani (Darwis & Supriyati, 2016:25).

Faktanya masih banyak masalah yang terjadi sepanjang subsidi pupuk diberlakukan, seperti kelangkaan pupuk, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar nonsubsidi dan antar wilayah. Masalah lain yang ditimbulkan oleh kebijakan subsidi

pupuk, yaitu: distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat (Adiraputra & Dika Supyandi, 2021:594). Menurut Sari & Fahmi, (2018:24) menyebutkan bahwa beberapa penyebab harga pupuk lebih tinggi dari HET adalah lemahnya pengawasan dan selisih antara kebutuhan pupuk di lapangan dengan alokasi. Badan Kebijakan Fiskal (2017) juga menyebutkan masalah yang muncul akibat terdapat dua pupuk di pasaran (subsidi dan *nonsubsidi*), di antaranya: pengoplosan pupuk subsidi dan nonsubsidi, penyebaran isu tentang kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga harganya mahal, terjadi penimbunan dan penggantian kemasan pupuk subsidi menjadi pupuk tidak disubsidi dan sebagainya. Akibatnya, banyak petani yang belum dapat merasakan manfaat subsidi pupuk secara utuh (Adiraputra & Dika Supyandi, 2021). Evaluasi program penyaluran subsidi diarahkan pada pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Penerapan pemupukan berimbang perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau (Kementerian Pertanian, 2020) dalam dalam (Jorgi et al., 2019). Meski demikian, dua dari enam indikator tersebut, yaitu tepat mutu dan tepat jenis tidak digunakan sebagai indikator karena sulit dikuantitatifkan.

Dikutip dari ritus resmi pemerintah Provinsi Kalbar, Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya wilayah Kabupaten Sambas sejak tahun 1960 adalah meliputi juga Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sekarang

dimana pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1960 itu adalah berdasarkan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Struktur perekonomian Kabupaten Sambas didominasi oleh sektor pertanian, karena sebagian penduduk Kabupaten Sambas adalah petani.



Gambar I.1
Peta Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Dikutip dari situs resmi pemerintah kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas mempunyai 19 kecamatan, hampir setiap Kecamatan mempunyai lahan pertanian. Dikutip

dari sistem infomasi menejemen penyuluh pertanian, Berikut adalah data jumlah kelompok petani di Kabupaten Sambas:

Tabel I.1
Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Sambas

No	BP3K	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah kelompok tani
1	BPP Jawai	1	13	265
2	BPP Jawai Selatan	1	9	175
3	BPP Paloh	1	8	267
4	BPP Pemangkat	1	8	98
5	BPP Sajad	1	4	63
6	BPP Salatiga	1	5	162
7	BPP Sambas	1	18	88
8	BPP Sebawi	1	7	64
9	BPP Sejangkung	1	12	139
10	BPP Selakau	1	11	171

No	BP3K	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah kelompok tani
11	BPP Selakau Timur	1	4	80
12	BPP Subah	1	11	146
13	BPP Tebas	1	23	378
14	BPP Tekarang	1	7	85
15	BPP Teluk Keramat	1	25	266
16	BP3K SAJINGAN BESAR	4	20	332
17	BPP Galing	2	10	154
18	BPP Semparuk	1	5	165
19	BPP Tangaran	1	8	153
Jumlah				3,251

Dari data di atas, maka kita ketahui jumlah kelompok tani yang terdaftar di sistem manajemen penyuluhan pertanian di Kabupaten Sambas sebanyak 3,251 kelompok tani yang tersebar di 19 Kecamatan 208 desa/kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk

Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, alokasi pupuk bersubsidi ini ditetapkan oleh kepala dinas provinsi dalam bentuk keputusan, yang kemudian diusulkan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Republik Indonesia. Berikut adalah data alokasi pupuk bersubsidi NPK di Kabupaten Sambas.

Tabel I.2
Laporan Penyaluran Pupuk NPK Tiap Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2020 (dalam ton)

NO	KECAMATAN	DISTRIBUTOR / VOLUME PENYALURAN NPK (TON)			TOTAL
		PT. Guntur Alam Perkasa	CV. Tiara Utama Ratna	PT. Puncak Mandala Agung	
1	Selakau	-	-	968.60	968.60
2	Selakau Timur	-	-	637.00	637.00
3	Pemangkat	-	-	407.50	407.50
4	Semparuk	-	-	1,036.65	1,036.65
5	Salatiga	-	-	913.00	913.00
6	Tebas	-	-	1,681.25	1,681.25
7	Tekarang	-	-	656.00	656.00
8	Sambas	-	435.35	-	435.35
9	Subah	-	819.00	-	819.00
10	Sebawi	-	256.00	-	256.00
11	Sajad	-	96.00	-	96.00
12	Jawai	-	-	946.45	946.45

NO	KECAMATAN	DISTRIBUTOR / VOLUME PENYALURAN NPK (TON)			TOTAL
		PT. Guntur Alam Perkasa	CV. Tiara Utama Ratna	PT. Puncak Mandala Agung	
13	Jawai Selatan	-	432.00	-	432.00
14	Teluk Keramat	-	1,376.00	-	1,376.00
15	Galing	-	848.00	-	848.00
16	Tangaran	856.00	-	-	856.00
17	Sejangkung	-	520.00	-	520.00
18	Sajingan Besar	-	112.00	-	112.00
19	Paloh	1,712.00	-	-	1,712.00
	JUMLAH	2,568.00	4,894.35	7,246.45	14,708.80

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas mendapat kuota pupuk subsidi jenis NPK, pada tahun 2020 total kuota pupuk yang telah disalurkan sebesar 14,708. 80 ton. Berdasarkan Permendag (Permendag Nomor 15/M-Dag/ Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian terdapat prinsip 6 (enam) Tepat. Prinsip tersebut adalah indikator utama dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Keenam prinsip ini merupakan kunci utama keberhasilan evaluasi penyaluran pupuk subsidi dengan tujuan agar pupuk subsidi yang disalurkan dapat tercapai target yang diharapkan pemerintah berupa kesejahteraan petani.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Paradigma yang hampir merupakan antithesis

dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Model yang digunakan adalah evaluasi program - evaluasi kesenjangan (*Discrepancy Evaluation Model*) yang dikembangkan oleh Malcolm Provus. Di samping itu selain melalui tiga pada model *Discrepancy*, penelitian evaluasi juga difokuskan untuk mengetahui adanya kesenjangan program. Informan yang dilibatkan adalah dinas pertanian, kelompok tani, Lembaga swadaya, dan tokoh masyarakat dengan melakukan serangkaian wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan Miles&Hubberman yang terdiri atas pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sambas adalah sebuah wilayah kabupaten di provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sambas. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah

6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai $\pm$ 128,5 km dan panjang perbatasan negara $\pm$ 97 km.

Visi dari Kabupaten ini adalah terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan dengan lima pernyataan misi, sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai antar elemen masyarakat; 2) Mengembangkan kemandirian prekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri, pendidikan, dan bidang lainnya; 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang intelektual, inovatif, dan berdaya saing; 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan 5) Meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kabupaten Sambas dengan mengambil tujuh orang sebagai narasumber pada tahap wawancara yang terdiri atas dinas pertanian, Erik Darmansyah, Gulma Pujianto, Suliati, Poktan Mekar Utama, Poktan Cinta Tani, dan Poktan Mekar Jaya.

Hasil Penelitian

1. Evaluasi Program Penyaluran Subsidi Pupuk NPK Tahun 2020 di Kabupaten Sambas

Pada bagian hasil penelitian khususnya pada evaluasi program penyaluran subsidi pupuk, terdapat lima indikator evaluasi kebijakan, sebagai berikut.

a. Efektivitas

Di Kabupaten Sambas, penyaluran pupuk subsidi jenis NPK di tahun 2020 telah terealisasi dengan cukup baik. Dengan kata lain program penyaluran ini telah berjalan cukup efektif dalam membantu para petani. Dengan demikian, evaluasi difungsikan sebagai tindak lanjut dari proses yang telah terjadi untuk proses yang akan datang. Program pemerintah seperti penyaluran pupuk bersubsidi ini memang harus berkelanjutan, karena dampaknya sangat positif bagi para petani.

b. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Dari beberapa penjelasan narasumber, keberadaan teknologi seperti E-RDKK telah membantu program penyaluran pupuk subsidi. Teknologi ini menyajikan keakuratan agar penerima pupuk subsidi tepat sasaran agar petani yang membutuhkan bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi (Kurniawan & Widarti,

2021). Tidak hanya tepat sasaran, hal ini juga memberikan ketepatan waktu untuk program yang dijalankan. Tepat waktu dan tepat sasaran telah menjadi indikator yang menggambarkan program berjalan secara efisien dan efektif (Arlan, 2019).

Salah satu narasumber juga menegaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi memang seharusnya diterima oleh orang yang tepat. Dalam hal ini adalah para petani yang sangat membutuhkan. Biaya yang diperlukan juga tentu akan lebih efisien karena pelaksana program tidak perlu membeli peralatan untuk mendata para penerima pupuk subsidi. Teknologi E-RDCK juga dapat menciptakan program yang tepat guna, artinya bahwa program yang dilaksanakan memang harus tepat sasaran terhadap petani yang benar-benar membutuhkan (Rasyid, 2021).

c. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Sarah & Subadi, 2021). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kecukupan menjelaskan tentang seberapa besar jumlah subsidi yang disediakan jika dibandingkan dengan kebutuhan. Di Kabupaten Sambas, kebutuhan pupuk subsidi sangat tinggi. Hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan Kabupaten Sambas. Ketersediaan pupuk subsidi hanya mampu memenuhi 30% permintaan

para petani di Kabupaten Sambas. Angka ini sebenarnya sangat jauh dari harapan. Akhir-akhir ini ketersediaan pupuk yang terbatas dan harga yang terus meningkat menyebabkan kegiatan pemupukan sering tertunda (Saputra, 2018). Hal ini diakibatkan oleh tidak sesuainya kuota yang diusulkan. Pemerintah Kabupaten dan Pusat juga perlu melakukan audit kembali baik itu dari segi permintaan atau dari segi ketersediaan pupuk. Banyaknya permintaan atas pupuk subsidi bisa saja diakibatkan harga pupuk di pasaran yang tinggi. Harga pupuk yang terus meningkat dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan permintaan pupuk dan biaya transportasi (Saputra, 2018).

d. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan (Rumbay dkk, 2022). Dalam hal ini, responsivitas program penyaluran pupuk subsidi dapat dinilai dari respon masyarakat khususnya petani yang menerima subsidi. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Natik & Putri, 2021). Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika

kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan atau berupa penolakan (Khairi & Yusran, 2021). Respon positif dari individu memiliki relevansi dengan dukungan individu itu sendiri (Darmawan & Mardikaningsih, 2021). Dari beberapa respon di atas, terlihat bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya program penyaluran pupuk subsidi dan ini menjadi bentuk respon positif dari masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat mendukung program ini. Oleh karena itu, responsivitas dari program penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sambas sudah berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang telah merasakan dampak langsung dari program ini.

e. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik memiliki hubungan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik (Yulianti, 2022). Dalam kaitannya dengan program penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sambas, aspek pemerataan dapat dilihat dari keadilan pelaksana program. Pihak pelaksana baik itu pemerintah Kabupaten dan Pusat telah mengatur sedemikian rupa agar pupuk subsidi ini dapat dibagi secara merata. Hal ini tergambar dengan tersebarnya kios pengecer pupuk di setiap kecamatan di Kabupaten Sambas. Aspek pemerataan dari program ini dapat dinilai bahwa program sudah

berlangsung dengan baik. Selain adanya sistem E-RDKK, di setiap kecamatan di Kabupaten Sambas telah berdiri kios pengecer atau penyalur subsidi. Tidak hanya itu, masyarakat di setiap kecamatan telah mendapatkan penyuluhan tentang ketersediaan pupuk. Pemerataan yang menyeluruh dari sebuah pelaksanaan program pemerintah memang sepatutnya sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Program bantuan dari pemerintah harus dilakukan secara adil dan merata (Andriani, 2021). Program ini telah dilaksanakan secara merata. Walaupun demikian, masih ada ditemukan kendala dalam penyaluran pupuk kepada para petani. Masyarakat khususnya petani yang menerima subsidi pupuk ini merasa terbebani oleh adanya biaya transportasi yang ditanggungkan kepada petani itu sendiri. Pembengkakan biaya transportasi pengangkutan pupuk memang masih menjadi permasalahan bagi petani (Aida & Rahminda, 2020). Oleh karena itu, ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah agar mempertimbangkan biaya tambahan untuk transportasi dalam menyalurkan pupuk subsidi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Penyaluran Pupuk Subsidi

a. Faktor pendukung

Dari beberapa pendapat narasumber, faktor pendukung yang pertama adalah dukungan dari

seluruh pihak. Selain itu, kerjasama antar pihak juga diperlukan untuk memaksimalkan program ini. Faktor dukungan dan kerjasama ini memang menjadi dua hal yang krusial dalam sebuah program pemerintah (Wahid & Amalia, 2020). Program ini tentu juga didukung oleh respon masyarakat yang positif. Sebagian besar masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini baik itu dari segi biaya, produktivitas hasil panen, hingga kesejahteraan petani. Dukungan yang positif dari masyarakat ini tentu bisa menjadi motivasi bagi pihak pemerintah, terlebih dengan melihat dampak langsung dari penyaluran pupuk subsidi. Hikon (2019) menjelaskan bahwa dukungan masyarakat yang tinggi bisa memaksimalkan sebuah program pemerintah. Dukungan masyarakat biasanya tercipta dari hasil kepuasan mereka terhadap sebuah program. Oleh karena itu, faktor kepuasan petani juga dapat menjadi pendukung program penyaluran pupuk subsidi ini.

b. Faktor penghambat

Dari beberapa pendapat narasumber, dapat diidentifikasi bahwa faktor penghambat yang pertama dari program ini adalah kuota pupuk subsidi yang tidak sebanding dengan permintaan. Jadwal kedatangan pupuk yang terkadang terlambat juga menjadi faktor penghambat program ini. Selain itu, di Kabupaten Sambas masih ditemukannya kendala dalam hal pendataan data penyaluran yang

kadang diterima pada akhir tahun. Dengan kata lain, proses pendataan dalam program ini masih cenderung lambat. Sebuah program pemerintah memang akan selalu menghadapi hambatan dan tantangan baik itu dari segi teknis maupun non-teknis. Hambatan teknis di sini berkaitan dengan peralatan seperti sarana dan prasarana (Hardiana & Asmara, 2022). Di Kabupaten Sumbas, telah terjadi keterlambatan penyaluran pupuk subsidi. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh sarana transportasi yang belum terkelola dengan baik. Di sisi lain, hambatan non-teknis tidak berhubungan dengan peralatan melainkan timbul dari diri seseorang, dalam hal ini adalah sumber daya manusia (Susanti & Standi, 2020). Hambatan non-teknis yang terjadi di Kabupaten Sambas tergambar dari adanya kendala dalam pendataan penerima pupuk subsidi. Dengan demikian, baik itu kendala teknis maupun non-teknis sudah sepatutnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pihak pemerintah terkait.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam Program Evaluasi

Upaya pemerintah Kabupaten Sambas sepatutnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini diperlukan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama, mengingat bahwa program penyaluran pupuk subsidi pada tingkat kabupaten adalah program yang cukup besar. Beberapa pendapat dari narasumber di atas

juga banyak menekankan bahwa pemerintah telah membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh Skokova (2018), sebuah pemerintahan perlu bekerjasama dalam memperhatikan kebutuhan sosial. Di Kabupaten

Sambas, masalah teknis juga masih terus ditangani untuk mengoptimalkan program penyaluran. Untuk lebih lengkap berikut merupakan tabel Upaya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memaksimalkan program penyaluran pupuk subsidi:

Tabel Upaya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam program penyaluran subsidi pupuk

No	Upaya Pemerintah
1	Melakukan Rapat koordinasi secara rutin baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten bersama dengan Produsen Pupuk, Distributor dan Kios
2	Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Barat melalui SK Gubernur No 639/EKON/2020.
3	Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melalui SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna memastikan penyaluran di tingkat petani telah tepat sasaran
4	Memperbaharui data – data petani untuk meminimalisir adanya petani yang tidak terinput dalam system ERDKK.
5	Mengoptimalkan kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi yang terdapat didalam ERDKK
6	Melakukan pengawasan secara intensive terkait penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan.

Pembahasan Penelitian

Proses evaluasi program ini ditinjau dari lima aspek yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsifitas, dan pemerataan.

1. Pertama, aspek efektivitas dapat dinilai dari ketepatan waktu dalam mencapai hasil/tujuan (Purnamasari & Ramdani, 2019). Dalam mencapai tujuan, Kabupaten Sambas telah meraih tujuan dengan cukup baik. Program ini terlaksana dengan cukup baik karena adanya pedoman dan pengawasan dalam mencapai tujuan (Rohmatillah & Shaleh, 2018; Irmawanti &

Arief, 2021). Agar lebih baik, program perlu didesain secara efektif dan berkelanjutan (Frick dkk, 2020). Dalam praktiknya, program ini masih menghadapi kendala yang telah menjadi pekerjaan rumah pihak terkait. Pelaksana bisa menghindari kendala yang serupa untuk kedepannya dengan cara menelaah permasalahan yang ada melalui sebuah evaluasi (Shamgita dkk, 2020).

2. Kedua, aspek efisiensi, aspek ini biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi (Fitriani

dkk, 2020). Pemerintah Kabupaten Sambas telah memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pelaksana atau pekerja yang berasal dari kabupaten setempat. Dalam pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kabupaten Sambas telah menggunakan sistem E-RDKK. Dengan pemanfaatan kedua sumber daya di atas, pemerintah Kabupaten Sambas telah menerapkan aspek efisiensi dengan baik. Penerapan aspek efisiensi diukur dengan pelaksanaan kegiatan tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya yang besar (Feriyana (2019).

3. Ketiga, aspek Kecukupan, hal ini berkaitan dengan tingkat efektivitas yang memuaskan kebutuhan (Sarah & Subadi, 2021). Dalam penelitian ini, aspek ini diukur dengan jumlah subsidi yang disediakan harus dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Di Kabupaten Sambas, ketersediaan hanya dapat memenuhi 30% dari permintaan. Ini masih jauh dari kata cukup. Permintaan yang memiliki angka lebih besar dari ketersediaan memang kerap terjadi di dunia bisnis (Hidayat & Purwadi, 2021).
4. Keempat, aspek Responsivitas, Rumbay dkk (2022) menjelaskan bahwa aspek ini

sebagai respon dari suatu aktivitas. Di Kabupaten Sambas, seluruh penerima pupuk subsidi memberikan respon yang positif. Mereka sangat terbantu dengan adanya program penyaluran pupuk bersubsidi. Respon seperti ini bisa menggambarkan dukungan untuk program yang ada (Darmawan & Mardikaningsih, 2021).

5. Kelima, aspek pemerataan, aspek ini juga telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Pemerintah kabupaten telah menyediakan kios agen di setiap kecamatan. Sosialisasi tentang pengadaan program ini juga tetap dilakukan di tingkat kecamatan. Unsur keadilan menjadi kunci dari aspek pemerataan. Program bantuan dari pemerintah harus dilakukan secara adil dan merata (Andriani, 2021).

Dari hasil pembahasan kelima aspek di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan sekaligus sebagai temuan pertama dalam penelitian ini. Temuan pertama menjelaskan hasil evaluasi dari program penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sambas telah berada di kategori cukup baik. Walaupun setiap aspek telah terpenuhi, tapi pemerintah kabupaten masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki program ini kedepannya. Temuan pertama ini

juga melengkapi beberapa penelitian terdahulu seperti dari Chakim (2019), Anisa & Adnan (2021), dan Priyono (2021).

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sambas. Faktor pendukung program ini yaitu dukungan dari pihak lain, kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, dan respon positif dari masyarakat. Dukungan dan kerjasama ini memang menjadi dua hal yang krusial dalam sebuah program pemerintah (Wahid & Amalia, 2020). Dukungan masyarakat yang tinggi juga bisa memaksimalkan sebuah program dari pemerintah (Hikon, 2019). Di sisi lain, faktor penghambat pelaksanaan program ini berupa kuota pupuk subsidi yang tidak sebanding dengan permintaan, jadwal kedatangan pupuk yang terkadang terlambat, dan pendataan masih cenderung terlambat. Seluruh penghambat yang ada menggambarkan kendala dari segi teknis maupun non-teknis. Hambatan teknis di sini berkaitan dengan peralatan seperti sarana dan prasarana (Hardiana & Asmara, 2022). Untuk non teknis, ini tidak berkaitan dengan alat melainkan sumber daya manusia (Susanti & Standi, 2020). Faktor pendukung dan penghambat di atas dikategorikan sebagai temuan kedua dalam penelitian ini. Temuan kedua ini mempertegas beberapa hasil penelitian terdahulu seperti dari Primadani & Kusdarini (2020),

Wijayanto & Lestari (2022), dan Nomita (2022).

Pemerintah Kabupaten Sambas telah melakukan banyak upaya untuk mengoptimalkan program penyaluran pupuk subsidi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas seperti melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, membentuk tim pengawasan, membentuk tim verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi, memperbaharui data petani, dan mengoptimalkan kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas di atas merupakan temuan ketiga dalam penelitian. Temuan ini melengkapi penelitian terdahulu seperti dari Karmeli dkk (2020), Misrah dkk (2020), dan Darapalgia dkk (2022). Upaya di atas menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas ingin memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan petani. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Skokova (2018), bahwa pemerintahan perlu bekerjasama dalam memperhatikan kebutuhan sosial. Dengan adanya pupuk subsidi, diharapkan kebutuhan sosial dari para petani akan semakin terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disintesis beberapa hal sebagai berikut.

1. Dimensi evaluasi program penyaluran subsidi pupuk tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas

petani di Kabupaten Sambas provinsi Kalimantan barat memiliki dampak positif dan negatif antara lain:

- a. Aspek efektivitas dapat dinilai dari ketepatan waktu dalam mencapai hasil/tujuan. Dalam mencapai tujuan, Kabupaten Sambas telah meraih tujuan dengan cukup baik. Program ini terlaksana dengan cukup baik karena adanya pedoman dan pengawasan dalam mencapai tujuan.
- b. Aspek efisiensi, aspek ini biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi. Dalam pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kabupaten Sambas telah menggunakan sistem E-RDKK. Dengan pemanfaatan kedua sumber daya di atas, pemerintah Kabupaten Sambas telah menerapkan aspek efisiensi dengan baik. Penerapan aspek efisiensi diukur dengan pelaksanaan kegiatan tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya yang besar.
- c. Aspek Kecukupan, hal ini berkaitan dengan tingkat efektivitas yang memuaskan kebutuhan. Aspek ini diukur dengan

jumlah subsidi yang disediakan harus dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Di Kabupaten Sambas, ketersediaan hanya dapat memenuhi 30% dari permintaan. Ini masih jauh dari kata cukup.

- d. Aspek Responsivitas, di Kabupaten Sambas, seluruh penerima pupuk subsidi memberikan respon yang positif. Mereka sangat terbantu dengan adanya program penyaluran pupuk bersubsidi. Respon seperti ini bisa menggambarkan dukungan untuk program yang ada.
 - e. Aspek pemerataan, aspek ini juga telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Pemerintah kabupaten telah menyediakan kios agen di setiap kecamatan. Sosialisasi tentang pengadaan program ini juga tetap dilakukan di tingkat kecamatan. Unsur keadilan menjadi kunci dari aspek pemerataan. Program bantuan dari pemerintah harus dilakukan secara adil dan merata.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi penyaluran subsidi pupuk jenis NPK tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Sambas

Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Faktor pendukung program ini yaitu dukungan dari pihak lain, kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, dan respon positif dari masyarakat. Dukungan dan kerjasama ini memang menjadi dua hal yang krusial dalam sebuah program pemerintah. Dukungan masyarakat yang tinggi juga bisa memaksimalkan sebuah program dari pemerintah.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan program ini berupa kuota pupuk subsidi yang tidak sebanding dengan permintaan, jadwal kedatangan pupuk yang terkadang terlambat, dan pendataan masih cenderung terlambat. Seluruh penghambat yang ada menggambarkan kendala dari segi teknis maupun non-teknis. Hambatan teknis di sini berkaitan dengan peralatan seperti sarana dan prasarana.
3. Upaya Pemerintah dalam evaluasi program penyaluran subsidi pupuk jenis NPK tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:
 - a. Melakukan Rapat koordinasi secara rutin baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten bersama dengan Produsen Pupuk, Distributor dan Kios.
 - b. Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Barat melalui SK Gubernur No 639/EKON/2020.
 - c. Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melalui SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna memastikan penyaluran di tingkat petani telah tepat sasaran.
 - d. Memperbaharui data – data petani untuk meminimalisir adanya petani yang tidak terinput dalam system ERDKK.
 - e. Mengoptimalkan kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi yang terdapat didalam ERDKK
 - f. Melakukan pengawasan secara intensive terkait penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiraputra, p., & dika supyandi. (2021). Efektivitas kebijakan subsidi pupuk di desa sukaasih kecamatan sukatani kabupaten bekasi. *Mimbar agribisnis jurnal pemikiran masyarakat ilmiah berwawasan agribisnis.*, 7(1), 594–606.
- Aditya alta. (2021). *Evaluasi program subsidi pupuk 2021 dan proyeksi ke depan*. Center for indonesian policy publish. <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-evaluasi-program-subsidi-pupuk-2021-dan-proyeksi-ke-depan?Lang=id>
- Amalina, e. N., rachmadi, a., & ... (2019). Analisis penerimaan implementasi smart classroom berdasarkan perspektif pengguna di fakultas pertanian universitas brawijaya dengan menggunakan *... teknologi informasi dan* <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/5183>
- Aida, F. N., dan Rahmanda, W. (2020). Analisis Biaya Transportasi Distribusi Pupuk Menggunakan Software Lingo: Perbandingan Biaya Transportasi Distribusi Pupuk Menggunakan Software Lingo. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 5 (2), 135-145.
- Anisa, f., & fachri adnan. (2021). Evaluasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di kecamatan padang sago, kabupaten padang pariaman. *Jurnal ilmu sosial dan pendidikan (jisip)*, 5(4).
- Arlan, A. S. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Al'iidara Balad*, 2 (1), 37-44.
- Atrup, puspitarini, & dhian, i. Y. (2021). Evaluasi pembelajaran jarak jauh-belajar dari rumah (pjj-bdr) satu tahun masa pandemik covid-19. *Jurnal nusantara of research*, 8(2), 76–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/nor.v8i2.16311>
- Chakim, M. L. (2019). Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *Jurnal Pangan*, 28 (3), 171–182.
- Darapalgia, N. P. M. H., Aromatica, D., Putera, R. E. (2022). Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3 (2), 85-100.
- Darmawan, D., dan Mardikaningsih, R. (2021). Studi Tentang Peran Kualitas Kehidupan Kerja, Kepemimpinan dan Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi. *Jurnal Simki Economic*, 4 (1), 89-98.
- Darwis, v., & supriyati, n. (2016). Subsidi pupuk: kebijakan, pelaksanaan, dan optimalisasi pemanfaatannya. *Analisis kebijakan pertanian*, 11(1), 45. <https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60>
- Duri, R., dan Rahmah, M. (2020). Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan

- Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 43-52.
- Elis. (2018). Evaluasi pelaksanaan program pemberian bantuan subsidi benih dalam peningkatan produktivitas padi di kecamatan torue kabupaten parigi moutong. *E-jurnal katalogis*, 3(5), 68–76.
- Feriyana, W. (2019). Pengaruh Pelatihan Terhadap Efisiensi Kerja Karyawan Pada Koperasi Setia Usaha Oku Timur. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 3 (2), 145-155.
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4 (2), 244-264.
- Frick, W. F., Kingston, T., Flanders, J. (2020). A review of the major threats and challenges to global bat conservation. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1469 (1), 5-25.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, g. C. B., Helmina Andriani, m. S., Roushandy Asri Fardani, s.si., m. P., Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, m.farm., a., Dhika Juliana Sukmana, & Ria Rahmatul Istiqomah, m. I. K. (2022). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (a. Husnu abadi, a.md. (ed.)). Cv. Pustaka ilmu.
- Hartatik, w., husnain, h., & ladiyani widowati. (2018). Peranan pupuk organik dalam peningkatan produktivitas tanah dan tanaman. *Sumberdaya lahan*, 9(2), 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/jsdl.v9n2.2015.%25p>
- Hidayat, R., dan Purwadi, P. (2021). Pengembangan Inovasi Pembibitan Porang (Amarphopallus Onchophillus L.) di Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS* 5 (1), 495-508.
- Hikon, W. M. L. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengubah permukiman kumuh menjadi destinasi wisata. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8 (3), 108-113.
- Irmawanti, N. D., dan Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2), 217-227.
- Karmeli, E., Fitryani, V., Warokah, E. (2020). Optimalisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 8 (3), 146-154, 2020
- Khairi, A., dan Yusran, R. (2021). Evaluasi Program Ka Bandara (Minangkabau Ekpres) Sebagai Sarana Transportasi Publik. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7 (3).
- Khoirina, L., dan Gunansyah, G. (2018). Implementasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Di Sekolah Dasar

- Gugus 1 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6 (8).
- Kurniawan, H. M., dan Widarti, S. (2021). Sosialisasi E-RDKK Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Di WKPP Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen*, 1 (1), 30-39.
- Jorgi, r. S., gayatri, s., & dalmiyatun, t. (2019). Hubungan tingkat pengetahuan petani dengan efektivitas pelaksanaan program kartu tani di kabupaten semarang. *Agraris: journal of agribusiness and rural development research*, 5(2). <https://doi.org/10.18196/agr.5278>
- Misrah, M., Sudarmi, S., Rahim, S. (2020). Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1 (2), 530-545.
- Mustafa, p. S. (2021). Model discrepancy sebagai evaluasi program pendidikan. *Palapa*, 9(1), 182-198. <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1067>
- Natika, L., dan Putri, G. N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 26-38.
- Nomita, B. P. (2022). *Evaluasi Program Kartu Tani dalam Mengoptimalkan Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Primadani, P., dan Kusdarini, E. (2020). Pelaksanaan Program Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul. *E-CIVICS* 9 (6), 632-642.
- Priyono, M. V. (2021). Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dari Kementerian Pertanian di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. *Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6 (1), 58-75.
- Purnamasari, H., dan Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4 (2), 136-149.
- Rasyid, H. (2021). Urgensi Kartu Tani dan E-RDKK bagi Petani. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/4689>
- Rohmatillah, S., dan Shaleh, M. (2018). Manajemen Kurikulum Program Tahfidz Al-Qur'an di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al-Azhar Mojosari Situbondo. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3 (1), 107-121.

- Rumbay, J. M., Liando, D. M., Tulung, T. E. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 2 (2).
- Saptana, iqbal, m., makky, a., & ar-rozi. (2018). Evaluation of seven revitalization policies in agricultural development. *Analisis kebijakan pertanian*, 11(2), 107–127.
- Saputra, J. (2018). Strategi pemupukan tanaman karet dalam menghadapi harga karet yang rendah. *Warta Perkaratan*, 37 (2), 75-86.
- Sarah, M., dan Subadi, W. (2021). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Pembangunan Infrastruktur Cor Jalan Usaha Tani Rt 02). *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis (JAPB)*, 4 (2), 972-984.
- Sari, I. R., & fahmi, a. (2018). Dampak subsidi pupuk terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kecamatan megaluh jombang dalam perspektif fenomenologis (studi kasus dusun sudimoro dan dusun paritan). *Ekonomi dan perkembangan bisnis*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32764/margin.v2i2.328>
- Shamgita, I. G. Y., Raditya, I. G. L. A., Putra, I. G. J. E. (2020). Analisis Dan Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi USSI Software Menggunakan Framework COBIT 5 Pada PT. BPR Naga. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*. 9 (1), 67-74.
- Skokova, Y., Pape, U., Krasnopol'skaya, I. (2018). The non-profit sector in today's Russia: Between confrontation and co-optation. *Europe-Asia Studies* 70 (4), 531-563, 2018
- Subagio, S. (2018). Identifikasi Kepedulian Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Fpmipa Ikip Mataram Terhadap Kebersihan Ruang Kuliah Dan Pengaruhnya Bagi Efektivitas Belajar. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*. 5 (1), 13-17.
- Susanti, S., dan Standi, K. (2020). Manajemen Produksi Program "Anak Indonesia" Di Tvri Jawa Barat. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 4 (2), 133-141.
- Sularno, bambang, i., ndayani, & nida. (2018). Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan distribusi pupuk bersubsidi di kabupaten karawang jawa barat. *Jurnal agrosains dan teknologi*, 1(2).
- Syah, wasiati, & makmur. (2017). Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di desa ajung kecamatan ajung. *Jurnal ilmu administrasi negara universitas jember*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2496>
- Wahid, U., dan Amalia, N. (2020). Tantangan Humas Pemerintah Daerah dalam Upaya Publikasi Inovasi Program Smart City.

- Nyimak: Journal of Communication*, 4 (1), 35-51.
- Wijayanto, H., dan Lestari, O. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah). *Journal of Political Issues*, 3 (2), 98-106.
- Yulianti, R. Y. (2022). Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjar. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7 (2).